jogja istimewa

Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

RENJA
RENCANA KERJA
2023

BIRO TATA PEMERINTAHAN

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Formulir E.29

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
Renja Biro Tata Pemerintahan Setda DIY
Tahun 2023

No.	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Ada Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah provinsi dan Agenda Kerja Perangkat Daerah provinsi.	√			
2	Pengolahan data dan informasi	√			
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah	√			
4	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah provinsi tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah provinsi.	√			
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi.	√			
6	Penelaahan rancangan awal RKPD provinsi.	√			
7	Perumusan tujuan dan sasaran.	√			
8	Penelaahan usulan masyarakat.	√			
9	Perumusan kegiatan prioritas.	√			
10	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi.	√			
10a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kabupaten/kota.	√			
10b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi.	√			
10c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah provinsi dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√			

10d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah provinsi sesuai surat edaran Gubernur.	√			
11	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√			
12	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah provinsi.	√			
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah provinsi telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√			
14	Dokumen Renja Perangkat Daerah provinsi yang telah disyahkan.	√			

Yogyakarta, 5 Juli 2022

KEPALA BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HARI EDI TRI WAHYU NUGROHO, S.I.P., M.Si.
NIP. 197410171999031002

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
ꦥꦼꦩꦼꦂꦤꦶꦠꦄꦤꦩꦢꦌꦄ
Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Psw. 1251
Faksimile (0274) 581507, Website: birotapem.jogjaprov.go.id
Email: rotapem@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

KEPUTUSAN KEPALA BIRO TATA PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 050/00442

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BIRO TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023

KEPALA BIRO TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 108 huruf a, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD

b. bahwa guna memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4846);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 1312 Tahun 2017);

8. Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala daerah Berakhir pada Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BIRO TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BIRO TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KE SATU : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melakukan pengolahan data dan informasi
2. menganalisis gambaran pelayanan perangkat daerah
3. menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah
4. merumuskan Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra Perangkat Daerah
5. merumuskan indikator sasaran,indikator program hingga program kegiatan 2023
6. mengikuti seluruh tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7. menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah

KE DUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja;

KE TIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 7 Februari 2022

KEPALA BIRO TATA PEMERINTAHAN
SETDA DIY

HARI EDI TRI WAHYU NUGROHO,S.IP,M.Si.
NIP. 19741017 199903 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BIRO TATA PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH DIY
NOMOR : 050/00442
TANGGAL : 7 Februari 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA

BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	Jabatan dalam Tim	Nama	NIP
1.	Ketua	Hari Edi Tri Wahyu Nugroho,S.IP,M.Si.	19741017 199903 1 002
2.	Wakil Ketua	Achmad Ubaidillah, S.E.,M.Si.,Ph.D	19741017 199903 1 002
3.	Sekretaris	Rini Sri Wahyuni, S. E. , M. M.	19750218 199803 2 002
4.	Anggota	Drs. Wahyu Krisnadi, M. M.	19661210 198503 1 001
5.	Anggota	Agustina Pangestujati, S. I. P.	19780822 200501 2 008
6.	Anggota	Rokhani Yulianti,S.H.	19670726 198903 2 007
7.	Anggota	Dyah Wiratni Hastuti, S.I.P.	19830403 200902 2 005
8.	Anggota	Nur Legawa, S.I.P, M.Ec.Dev, M.Ec.	19841227 201001 1 011
9.	Anggota	Andriyan Muryanto, S.H,M.H.	19800508 201101 1 004
10.	Anggota	Alexander Priyasma, S.I.P.	19840428 201101 1 008
11.	Anggota	Gigusa Ella, S.H.	19870213 201101 1 009
12.	Anggota	Wahyu Cahyaningsih, SI.P.	19870202 201502 2 002
13.	Anggota	Rachmadilla Sekar Larasati,S.IP.	19970130 202012 2 011

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 7 Februari 2022

KEPALA BIRO TATA PEMERINTAHAN
SETDA DIY

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BIRO TAPEM

HARI EDI TRI WAHYU NUGROHO,S.IP,M.Si.
NIP. 19741017 199903 1 002

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2023 ini merupakan dokumen perencanaan tahun pertama periode Renstra Tahun 2023-2026 yang bertujuan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan. Rencana Kerja Tahun 2023 terdiri dari pendahuluan, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja SKPD tahun lalu, tujuan, sasaran, indikator kinerja yang menggambarkan pencapaian Rencana Strategis Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, program/kegiatan, dana indikatif beserta sumbernya di 2023 dan prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif di tahun 2024. Penyusunan Rencana Kerja ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan pencapaian target kinerja Biro Tata Pemerintahan Setda DIY pada tahun 2023.

Program dan kegiatan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY tahun 2023 terkait dengan substansi perubahan di bidang tata kelola pemerintahan yang meliputi bidang kelembagaan, analisa jabatan dan ketatalaksanaan serta sejalan dengan tema pembangunan DIY Tahun 2023. Program dan kegiatan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY berpedoman pada rencana strategis Biro tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2023 yang mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022. Dalam instruksi tersebut, Menteri Dalam Negeri menginstruksikan kepada Gubernur yang masa jabatannya berakhir tahun 2022 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Tahun 2023-2026 serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah Provinsi untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang menjadi pedoman pembuatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.

Demikian Renja Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2023 kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi semua pihak, khususnya untuk pelaksanaan program kegiatan Biro Tata Pemerintahan Tahun 2023 ke depan. Biro Tata Pemerintahan membutuhkan dukungan dan kerjasama sinergis dari berbagai pihak, sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan di DIY.

Yogyakarta, 5 Juli 2022

KEPALA BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HARI EDI TRI WAHYU NUGROHO, S.I.P., M.Si.
NIP. 197410171999031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ix**

DAFTAR GAMBAR ..... **x**

BAB 1 PENDAHULUAN **1-1**

1.1 Latar Belakang 1-1

1.2 Landasan Hukum 1-3

1.3 Maksud dan Tujuan 1-7

1.4 Sistematika Penulisan 1-7

BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2021 (n-2) **2-1**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra Tahun 2021 2-1

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2-35

2.2.1 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2-35

2.2.2 Urusan Otonomi Daerah Dan Pemerintahan Umum 2-39

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 2-41

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2-46

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH **3-1**

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3-1

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 3-2

3.3 Program dan Kegiatan 3-5

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **4-1**

BAB 5 PENUTUP **5-1**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Perangkat Daerah 2-4642

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan menjadi landasan utama dalam melakukan manajemen pembangunan yang diperlukan, hal tersebut dikarenakan kebutuhan akan pembangunan lebih besar dari sumber daya (*resources*) yang tersedia. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah dituntut untuk dapat memanfaatkan sumber daya tersebut secara efektif dan efisien agar manfaatnya dapat dirasakan secara adil dan tepat sasaran. Perencanaan pembangunan yang baik dapat menjadi dasar untuk merumuskan kegiatan pembangunan secara efisien dan efektif sehingga hasilnya dapat optimal dalam pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia, definisi tersebut termuat dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 1 angka 1. Selanjutnya Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada Pasal 1 angka 3 didefinisikan sebagai satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Perencanaan pembangunan berjalan sinergis dengan penganggaran, baik di tingkat Pusat maupun Daerah.

Renja Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun Anggaran 2023 memiliki keterkaitan langsung dengan Rencana Strategis Biro Tata Pemerintahan Setda DIY yang disusun untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Tahun 70 Tahun 2021 dimana diinstruksikan bahwa penyusunan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 50-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Prencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pada Renja Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2023 ini juga mencakup program kegiatan dan subkegiatan yang dibiayai dari Dana Keistimewaan baik pada urusan kebudayaan, urusan pertanahan maupun urusan kelembagaan. Program Renja

diselaraskan dengan program dan kegiatan diatasnya agar sesuai dengan prioritas pembangunan nasional.

Terdapat lima regulasi pada level undang-undang yang mempengaruhi dan membawa konsekuensi untuk implementasi perencanaan dan penganggaran tahun 2023 pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah DIY tahun 2023 mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut.

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No 24 Tahun 2013;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah;
17. Peraturan Presiden No. 126 Tahun 2012 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional;
18. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan ke IV atas Peraturan Presiden No. 26 tahun 2009;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
21. Peraturan Presiden No 96 Tahubn 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
22. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

28. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
29. Peraturan Daerah DIY Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Adminduk dan KIA;
30. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
31. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039;
32. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembangunan Wilayah Perbatasan di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 3);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2006 tentang Penetapan Batas Daerah Istimewa Yogyakarta – Jaawa Tengah;
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Gubernur Nomor 55 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Data Kependudukan;
36. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah No 9 Tahun 2015;
37. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
38. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan;
39. Peraturan Gubernur DIY Nomor 68 Tahun 2020 tentang Pedoman Verifikasi Kelengkapan Dokumen Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu, dan Pemberhentian Sementara Anggota DPRD DIY dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 68);
40. Peraturan Gubernur DIY Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal di DIY;

41. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan;
42. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 136 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
43. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2026;
44. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah;
45. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud :

a. Memberikan arahan, acuan dan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan;
b. Mengefektifkan dan mengarahkan proses pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan.

Tujuan :

Tersusunnya perencanaan daerah yang komprehensif, transparan, akuntabel, partisipatif serta selaras dengan visi misi Pemerintah Daerah DIY.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Biro Tata Pemerintahan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

BAB I : **Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum serta sistematika penyusunan Rencana Kerja Biro Tata Pemerintahan Setda DIY tahun 2023.

BAB II : **Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu (Tahun 2021/n-2)**

Bab ini berisi evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap

rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III : Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah

Bab ini berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan Renja, sasaran Renja dan uraian Program dan Kegiatan Renja.

BAB IV : Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V : Penutup

Bab ini berisi penutup dari uraian Bab-Bab sebelumnya.

BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2021 (n-2)

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan antara target program-kegiatan pada Renstra Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dengan realisasi pelaksanaan program-kegiatan pada tahun 2021, kemudian memperkirakan realisasi capaian target dalam Rencana Strategis (Renstra) pada tahun berjalan. Dengan demikian diperoleh informasi mengenai realisasi program kegiatan yang tidak mencapai target, kemudian program kegiatan yang mencapai target, serta program kegiatan yang melampaui target pada tahun 2021. Disamping itu, evaluasi juga dilakukan terhadap keadaan pegawai pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY beserta dengan analisis kebutuhan pegawai (data per tanggal 31 Desember tahun 2021), serta keadaan sarana dan prasarana pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY pada tahun anggaran (TA) 2021.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Biro Tata Pemerintahan Setda DIY selanjutnya dipergunakan untuk menentukan program kegiatan yang tidak mencapai target, kemudian program kegiatan yang mencapai target, serta program kegiatan yang melampaui target pada tahun 2021, khususnya program/kegiatan hasil redesain SKPD tahun 2021. Penentuan didasarkan pada kolom 8 atau kolom prosentase Tingkat Realisasi (Realisasi Renja SKPD tahun 2021 dibagi dengan Target Renja SKPD tahun 2021). Berikut disampaikan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Biro Tata Pemerintahan Setda DIY sampai dengan tahun 2021

.

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Lembar : 1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 (n)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020(n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022) n-1	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun 2021(n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021(n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) n-1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYNAN DASAR**									
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN**									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 (n)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020(n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022) n-1	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun 2021(n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021(n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) n-1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	PENCATATAN SIPIL									
2.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**									
2.12.02.1	**Pelayanan Pendaftaran Kependudukan**									
2.12.02.1.01.02	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu	Dokumen kependudukan untuk penduduk rentan administrasi kependudukan (Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Orang Terlantar,	80 dokumen	80 dokumen	50 dokumen	221 dokumen	442	80 dokumen	0 dokumen	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 (n)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020(n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022) n-1	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun 2021(n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021(n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) n-1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Provinsi	Kartu Identitas Anak, Akta Kelahiran)								
2.12.02. 1.01.04	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	Instansi yang memanfaatkan data kependudukan	n/a	2 instansi	3 instansi	3 instansi	100	3 instansi	2 instansi	66.7
2.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**									
2.12.03. 1.01.04	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	KTP-el yang diterbitkan dalam pelayanan terpadu	n/a	200 KTP	200 KTP	214 KTP	100	2000 KTP	0 KTP	0
		Terselenggaranya Pelayanan Terpadu Penerbitan Dokumen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Lintas Kab/ Kota se-DIY	n/a	n/a	2 kali	2 kali	100	2 kali	0 kali	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 (n)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020(n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022) n-1	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun 2021(n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021(n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) n-1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		KIA yang diterbitkan dalam pelayanan terpadu	n/a	n/a	100 KIA	517 KIA	517	750 KIA	0 KIA	100
		Blanko KIA	n/a	20000 KIA	10000 keping	10000 keping	100	10000 keping	10000 keping	100
2.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**									
2.12.04.1.02.02	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Masyarakat yang memahami Perda No. 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan AdministrasiKependudukan dan Kartu Identitasn Anak	n/a	600 Orang	850 orang	850 orang	100	300 orang	250 orang	83.3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 (n)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020(n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022) n-1	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun 2021(n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021(n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) n-1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.12.04.1.02.05	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Lembaga yang dikoordinasi dan bekerjasama dalam Insentif Anak di DIY	n/a	7 lembaga	5 lembaga	5 lembaga	100	5 lembaga	3 lembaga	60
2.12.04.1.02.07	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Masyarakat yang sadar Adminduk	n/a	600 orang	600 orang	2000 orang	333.3333	600 orang	600 orang	100
2.12.04.1.03.01	Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi	Laporan Hasil Monitoring dan evaluasi pelayanan Adminduk di kabupaten/kota	n/a	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	0 dokumen	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 (n)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020(n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022) n-1	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun 2021(n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021(n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) n-1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Kependudukan									
2.12.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**									
2.12.05.1.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Konten yang dikembangkan dari sistem informasi kependudukan	n/a	0 konten	2 konten	2 konten	100	2 konten	1 konten	50
2.12.05.1.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta	Profil perkembangan kependudukan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	0 dokumen	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 (n)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020(n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022) n-1	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun 2021(n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021(n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) n-1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Kebutuhan yang lain									
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**									
2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN***									
2.22.08.1.06.03	Pengadaan Sarana Publikasi dan Penanda	Laporan Hasil Pelaksanaan Penanda Keistimewaan	n/a	n/a	1 dokumen	1 dokumen	100	n/a	n/a	n/a

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 (n)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020(n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022) n-1	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun 2021(n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021(n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) n-1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Keistimewaan*									
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**									
4.1	**SEKRETARIAT DAERAH**									
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**									

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 (n)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020(n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022) n-1	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun 2021(n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021(n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) n-1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kesepakatan hasil Forum Perangkat Daerah	n/a	1 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	100	n/a	n/a	n/a
		Dokumen perencanaan perangkat daerah	5 dokumen	5 dokumen	10 dokumen	12 dokumen	120	5 dokumen	5 dokumen	80
4.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**	Dokumen RKA DAK bidang adminduk	n/a	n/a	1 dokumen	1 dokumen	100	n/a	n/a	n/a
		Aparatur yang meningkat kapasitasnya dalam perencanaan dan penganggaran DAK bidang adminduk : 60 orang dari	n/a	n/a	60 orang	60 orang	100	n/a	n/a	n/a
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan	Laporan penyelenggaraan	n/a	n/a	12 dokumen	12 dokumen	100	n/a	n/a	n/a

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 (n)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020(n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022) n-1	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun 2021(n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021(n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) n-1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	adminduk								
4.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Realisasi capaian fisik dan keuangan sesuai tahapan ROPK	n/a	n/a	100%	100%	100	n/a	n/a	n/a
4.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji ASN Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	n/a	n/a	1 tahun	1 tahun	100	n/a	n/a	n/a
4.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi pekantoran yang terselesaikan dengan baik dan tepat waktu : 12 bulan dari	n/a	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	1 tahun	1 tahun	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 (n)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020(n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022) n-1	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun 2021(n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021(n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) n-1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	1 laporan	100
4.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen Laporan Bulanan dan Dokumen Laporan Semesteran	4 laporan		14 laporan	14 laporan	100	14 laporan	7 laporan	50
4.01.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	Dokumen Laporan Prognosis	n/a	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	1 laporan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 (n)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020(n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022) n-1	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun 2021(n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021(n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) n-1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Anggaran									
4.01.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan**	Sosialisasi program adminduk melalui media cetak dan elektronik	n/a	n/a	3 jenis	3 jenis	100	n/a	n/a	n/a
		Peningkatan pemahaman kebijakan aminduk bagi masyarakat	n/a	n/a	90 orang	90 orang	100	n/a	n/a	n/a
4.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan**	Peningkatan Kapastitas Aparatur Adminduk di Kab/kota	n/a	n/a	130 orang	130 orang	100	n/a	n/a	n/a

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 (n)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020(n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022) n-1	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun 2021(n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021(n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) n-1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	11 jenis	8 jenis	8 jenis	100	8 jenis	6 jenis	75
4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	1 paket	37 jenis	34 jenis	34 jenis	100	13 jenis	13 jenis	100
		Tabung pemadam kebakaran yang terisi	1 paket	11 tabung	11 tabung	11 tabung	100	11 tabung	0 tabung	0
4.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1 paket	16 jenis	15 jenis	15 jenis	100	15 jenis	7 jenis	46.7
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dokumen Hasil Penggandaan	1 paket	16 jenis	50000 lembar	50000 lembar	100	50000 lembar	8000 lembar	16
		Barang Cetakan	1 paket	16 jenis	13 unit	13 unit	100	n/a	n/a	n/a

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 (n)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020(n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022) n-1	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun 2021(n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021(n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) n-1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan tindak lanjut hasil rapat koordinasi	n/a	1 tahun	12 bulan	12 bulan	100	n/a	n/a	n/a
		Laporan dan Rencana Tindak Lanjut Hasil Konsultasi dan Koordinasi	1 laporan	1 tahun	12 bulan	12 bulan	100	n/a	n/a	n/a
4.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	Peralatan Kantor sesuai RKBMD	14 Unit	2 jenis	3 jenis	3 jenis	100	1 jenis	1 jenis	100
		Perlengkapan Kantor sesuai RKBMD	n/a	6 jenis	1 jenis	1 jenis	100	n/a	n/a	n/a
4.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peralatan Kantor sesuai RKBMD : 3 jenis dari	n/a	n/a	3 jenis	3 jenis	100	n/a	n/a	n/a
		Perlengkapan Kantor sesuai RKBMD : 1 jenis dari	n/a	n/a	1 jenis	1 jenis	100	n/a	n/a	n/a

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 (n)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020(n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022) n-1	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun 2021(n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021(n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) n-1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat-Menyurat	1 laporan	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100	3 jenis	1 jenis	33.3
		Penyediaan blangko KTP-el bagi pelayanan di kab/kota	n/a	n/a	150000 blangko	150000 blangko	100	n/a	n/a	n/a
4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan dinas operasional roda 2 yang terpelihara sesuai RKBMD	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	100	7 unit	7 unit	100
		Kendaraan dinas operasional roda 4 yang terpelihara sesuai RKBMD	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	100	5 unit	5 unit	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 (n)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020(n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022) n-1	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun 2021(n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021(n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) n-1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan kantor yang terpelihara sesuai RKBMD	12 bulan	15 Jenis	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	6 bulan	50
4.01.03	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**									
4.01.03.1.01.03	Fasilitasi Penataan Wilayah	Laporan Penyelarasan Pembangunan di Wilayah Perbatasan	n/a	n/a	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	0 laporan	0
		Toponimi unsur warisan budaya	n/a	n/a	1 dokumen	1 dokumen	100	n/a	n/a	n/a
		Database pilar batas untuk pengelolaan tanda batas wilayah	5 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	0 dokumen	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 (n)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020(n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022) n-1	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun 2021(n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021(n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) n-1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten/Kota di DIY	n/a	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100
4.01.03.1.02.02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Laporan Standar Pelayanan Minimal 6 bidang SPM	1 Laporan	1 Laporan Standar Pela	1 laporan	1 laporan	100	1 dokumen	1 dokumen	100
		Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	n/a	1 laporan	1 laporan	100	1 dokumen	1 dokumen	100
		Rekomendasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	n/a	12 Rekomendasi tentang	1 rekomendasi	10 rekomendasi	1000	n/a	n/a	n/a

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 (n)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020(n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022) n-1	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun 2021(n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021(n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) n-1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.03.1.02.03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Laporan Hasil Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di DIY	n/a	n/a	1 laporan	1 laporan	100	n/a	n/a	n/a
		Laporan Desa yang terdampingi dalam penyusunan dokumen administrasi perencanaan responsif	n/a	n/a	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	0 laporan	0
		Laporan pengesahan, pengangkatan dan pelantikan Bupati-Wakil Bupati terpilih	n/a	n/a	1 laporan	1 laporan	100	1 dokumen	1 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 (n)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020(n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022) n-1	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun 2021(n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021(n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) n-1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		hasil Pilkada								
		Laporan Kecamatan dengan aparatur yang terbina sebagai pembina teknis pemerintah desa (PTPD)	n/a	n/a	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	0 laporan	0
		Berkas usulan pemberhentian, pengangkatan anggota DPRD pergantian antar waktu	n/a	6 Usulan/ Draf SK	3 usulan/draf SK	3 usulan/draf SK	100	3 usulan SK	0 usulan SK	0
		Laporan Hasil Pemantauan Pengelolaan Dana Desa di DIY	n/a	1 Rekomendasi	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	0 laporan	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 (n)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020(n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022) n-1	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun 2021(n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021(n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) n-1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.03.1.03.01	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	Laporan Penyelenggaraan Forum Mitra Praja Utama di DIY	n/a	n/a	1 laporan	1 laporan	100	n/a	n/a	n/a
		Naskah Perjanjian Kerjasama Dalam Negeri	2 Dokumen	5 Naskah Perjanjian Kerjasama Dalam Negeri	5 Naskah Perjanjian	5 Naskah Perjanjian	100	5 Naskah Perjanjian	2 Naskah Perjanjian	40
		Surat Keputusan Bersama (SKB) Gubernur Anggota FKD-MPU	n/a	0 SKB	2 SKB	2 SKB	100	2 SKB	0 SKB	0
4.01.03.1.03.02	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	Rekomendasi Hasil Monev Kerjasama Dalam Negeri	n/a	0 rekomendasi	0 rekomendasi	0 rekomendasi	0	n/a	n/a	n/a

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 (n)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020(n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022) n-1	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun 2021(n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021(n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) n-1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN***									
4.01.10.1.01.10	Pelaksanaan Kelembagaan Asli*	Kajian Pemberdayaan Desa sebagai basis Keistimewaan DIY yang terintegrasi	n/a	n/a	1 dokumen	1 dokumen	100	n/a	n/a	n/a
		Pembangunan Sistem Informasi Kalurahan	n/a	n/a	1 aplikasi	1 aplikasi	100	1 aplikasi	1 aplikasi	100
		Hasil Analisa Pembangunan Sistem	n/a	n/a	1 dokumen	1 dokumen	100	n/a	n/a	n/a

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 (n)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020(n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022) n-1	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun 2021(n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021(n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) n-1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Informasi Kalurahan								
		Percepatan vaksinasi covid-19	n/a	n/a	50000 vaksin	60000 vaksin	120	n/a	n/a	n/a
		Laporan Hasil koodinasi, Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Kelembagaan Kalurahan dan Kapanewon/Kemantren	n/a	n/a	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	0 laporan	0
		Kajian Standar Bangunan dan Arsitektur Pemerintahan Kalurahan	n/a	n/a	1 dokumen	1 dokumen	100	n/a	n/a	n/a

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 (n)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020(n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022) n-1	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun 2021(n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021(n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) n-1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Peningkatan Kapasitas SDM Desa berbasis Keistimewaan DIY	n/a	n/a	392 kalurahan	392 kalurahan	100	n/a	n/a	n/a

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi dari target yang telah disusun seluruhnya dapat memenuhi target dari yang telah ditetapkan. Dari sisi indikator output (keluaran) secara makro seluruhnya memenuhi target, Tetapi apabila di lihat dari indikator inputnya dari sisi realisasi anggarannya terdapat beberapa serapan yang tidak optimal yang dikarenakan adanya efisiensi anggaran. Dari target anggaran sebesar Rp. 14.813.086.071 (100%), diperoleh angka realisasi sebesar Rp. 2.773.070.279 (85.45 %). Berikut disampaikan efisiensi anggaran per sasaran strategis Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2021:

Tabel 2. 2 Efisiensi Anggaran Berdasarkan Sasaran

No	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja (≥100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama	Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama yang direspon dengan kebijakan	121,5	49.53	50.47
2	Meningkatnya tertib administrasi Kependudukan	Jumlah instansi lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK	100	87,35	12,65

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2021

Berdasarkan tabel analisis efisiensi di atas dapat diketahui bahwa sasaran pertama dengan 1 (satu) indikator yaitu Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama yang direspon dengan kebijakan memiliki nilai efisiensi 50,47%. Efisiensi anggaran terjadi karena faktor eksternal di antaranya kebijakan APBD untuk tidak membelanjakan rekening tertentu yang tidak sesuai dengan peruntukannya, efisiensi perjalanan dinas, efisiensi makan minum rapat dan anggaran tuan rumah Mitra Praja Utama yang dilaksanakan dengan daring.

Sedangkan indikator dari sasaran kedua yaitu Jumlah instansi lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK, memiliki nilai efisiensi 12,65%. Hal itu terjadi karena terdapat efisiensi di beberapa rincian objek belanja pada sasaran kedua. Beberapa efisiensi tersebut, tidak mengganggu capaian indikator output kegiatan, sehingga capaian output tetap ≥100% dari target yang ditentukan.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja antara Gubernur DIY dengan Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, sasaran strategis Biro Tata Pemerintahan Setda DIY pada tahun 2021 adalah : 1) Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan

kerja sama; dan 2) Meningkatnya tertib administrasi Kependudukan; dengan target Renstra dan realisasi capaian Renstra tahun 2021 sebagai berikut.

Tabel 2. 3 Capaian Target Kinerja Renstra Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2021		Realisasi Capaian Renstra Tahun 2021		% Rasio Capaian Renstra Tahun 2021	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	
1	Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama	Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama yang direspon dengan kebijakan	100	Rp. 1.978.439.500	121,5	Rp. 979.921.084	121,5	49,53
2	Meningkatnya tertib administrasi Kependudukan	Jumlah instansi lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK	13	Rp. 598.721.000	13	Rp. 522.998.974	100	87,35
Rata-rata Capaian							**110.75**	**68.44**

Berdasarkan capaian target kinerja di atas, selanjutnya dilakukan analisis per sasaran kinerja Biro Tata Pemerintahan Setda DIY pada Renstra Tahun 2021. Secara umum capaian renstra tahun 2021 telah memenuhi target, bahkan pada indikator Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama yang direspon dengan kebijakan melebihi target yaitu sebesar 121,5% dari target 100%. Berikut disampaikan evaluasi dan analisis Renstra Biro Tata Pemerintahan Setda DIY tahun 2021 berdasarkan tabel di atas.

Pada sasaran kedua (Meningkatnya tertib administrasi kependudukan) mendapatkan dukungan tambahan dari Dana Alokasi Khusus sebesar anggaran Rp 1.053.705.00,- untuk Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan sehingga total anggaran tahun 2021 (APBD+DAK) sejumlah Rp 1.652.426.000,00.

A. Sasaran Pertama : Meningkatnya tertib tata kelola penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama serta Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren.

Sasaran pertama dalam Renstra Biro Tata Pemerintahan Setda DIY tahun 2021 adalah Meningkatnya tertib tata kelola penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama serta Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren.

A.1. Indikator Kinerja : Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama daerah serta pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren yang direspon dengan kebijakan

Indikator kinerja Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama daerah serta pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren yang direspon dengan kebijakan pada Renstra tahun 2023 masing-masing sebesar 100%. Sedangkan realisasi capaian Renstra tahun 2021 untuk kinerja dan anggaran masing-masing mencapai 121,5% dan Rp. 979.921.084,00. Dengan demikian diperoleh rasio capaian Renstra tahun 2021 terhadap target dan realisasi sebesar 121.5% kinerja dan 49,53% anggaran (Tabel 2.1).

Secara makro, performa Biro Tata Pemerintahan Setda DIY untuk mencapai indikator kinerja Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah yang direspon dengan kebijakan (dengan target 100%) berjalan optimal. Sampai dengan akhir triwulan IV TA 2022, telah dihasilkan 21 dari target 18 rumusan bahan kebijakan dalam merespon dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah, sehingga diperoleh capaian realisasi indikator sebesar 121.5%. Adapun rincian dari 21 rumusan bahan kebijakan tersebut di antaranya ialah :

a. Laporan Standar Pelayanan Minimal 6 bidang SPM
b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
c. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten/Kota di DIY
d. Surat Gubernur DIY kepada Bupati Bantul, Nomor 177/6223, tanggal 29 Maret 2021 hal Usulan PAW Anggota DPRD Kabupaten Bantul , bahwa usulan PAW Anggota DPRD Kabupaten Bantul belum dapat diproses lebih lanjut karena terdapat berkas administrasi yang belum dapat dipenuhi
e. Surat Gubernur Nomor 131/1755, hal Usulan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Jabatan Tahun 2016-2022
f. Surat Gubernur Nomor 131/1756, hal Usulan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Jabatan Tahun 2016-2022
g. Surat Gubernur Nomor 131/1757, hal Usulan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Jabatan Tahun 2016-2022

h. Surat Gubernur Nomor 131/1760, hal Usulan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta
i. Surat Gubernur Nomor 131/1761, hal Usulan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta
j. Surat Gubernur Nomor 131/1762, hal Usulan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta
k. Keputusan Gubernur DIY Nomor 33/KEP/2021 tentang Penunjukan Pelaksana Harian Bupati Bantul, Keputusan Gubernur DIY Nomor 34/KEP/2021 tentang Penunjukan Pelaksana Harian Bupati Gunungkidul, dan Keputusan Gubernur DIY Nomor 35/KEP/2021 tentang Penunjukan Pelaksana Harian Bupati Sleman oleh Gubernur DIY
l. Rekomendasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
m. Laporan Penyelenggaraan Forum Mitra Praja Utama di DIY
n. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah DIY dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Terpadu Yogyakarta tentang Kerjasama Pengemangan dan Pemberdayaan Sumber Daya di DIY
o. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah DIY dengan PT POS Indonesia (PERSERO) tentang Pemulihan dan Pengembangan Ekonomi
p. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah DIY dengan Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa tentang Kerja Sama Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan
q. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah DIY dengan PT Brilliant Ecommerce Berjaya tentang Pemanfaatan Platform E-Marketplace untuk Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY
r. Rencana Kerja antara Pemerintah Daerah DIY dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di DIY
s. Surat Keputusan Bersama (SKB) Gubernur Anggota FKD-MPU
t. Database pilar batas untuk pengelolaan tanda batas wilayah

Tabel 2. 4 Dinamika Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama daerah serta pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren yang direspon dengan kebijakan

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan	Target	Anggaran
1	3	4	5
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Capaian Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang Tertib dan Berkualitas**	**100%**	**3,192,755,000**
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	**Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan umum, penataan wilayah, otonomi daerah dan kerjasama.**	**100%**	**1,319,000,000**

Beberapa faktor penghambat dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut: (dari faktor penghambat web monev 2021)

1) Adanya pandemi *covid-19* menyebabkan kelumpuhan di semua sektor.
2) Penerapan SPM juga terkendala pendataan, perencanaan, penganggaran dan pendanaan sehingga perlu sinergitas antara OPD Pengampu dengan TAPD dan pihak ketiga serta mencari sumber-sumber dana lain yang sah untuk pemenuhan SPM Urusan;
3) Masih banyak instansi yang belum menggunakan PP 28/2018 sebagai dasar penyusunan naskah kerjasama. Konsep kerjasama antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang disebut dengan nama sinergi perencanaan pelaksanaan pembangunan, belum begitu diketahui oleh instansi-instansi yang selama ini mengajukan permohonan kerjasama ke Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Kemudian faktor yang mendukung pencapaian indikator kinerja ini yaitu koordinasi yang solid baik secara internal maupun eksternal. Koordinasi menggunakan teknologi informasi lebih dioptimalkan mengingat pandemi *covid-19* tidak memungkinkan bertatap muka secara langsung.

B. Sasaran Kedua : Meningkatnya tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sasaran kedua dalam Renstra Biro Tata Pemerintahan Setda DIY tahun 2021 adalah Meningkatnya tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sasaran ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja, yaitu : Persentase kepemilikan dokumen penting kependudukan.

B.1. Indikator Kinerja : Persentase kepemilikan dokumen penting kependudukan

Indikator Jumlah instansi lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK memiliki target kinerja dan anggaran pada tahun 2023 masing-masing sebesar 100%. Sedangkan realisasi capaian Renstra tahun 2021 untuk kinerja dan anggaran masing-masing mencapai 100% dan Rp522.998.974,00. Dengan demikian diperoleh rasio capaian Renstra tahun 2021 terhadap target dan realisasi sebesar 100% kinerja dan 87,35% anggaran (Tabel 2.1).

Tabel 2. 5 Dinamika Persentase kepemilikan dokumen penting kependudukan

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan	Target	Anggaran
1	3	4	5
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	**Persentase Tercapainya fasilitasi Administrasi Pendaftaran Penduduk bagi masyarakat di kabupaten/kota**	**100%**	**49.518.000**
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	**Persentase Tercapainya fasilitasi Administrasi Pencatatan Sipil bagi masyarakat di kabupaten/kota**	**100%**	**192.738.000**
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	**Persentase Tercapainya fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di DIY**	**100%**	**49.518.000**
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	**Persentase tercapainya pengelolaan profil kependudukan di DIY**	**100%**	**173.900.000**
			465.674.000

Indikator kinerja Jumlah instansi lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK mencapai angka 100%. Capaian jumlah instansi lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK tidak terlepas dari terjalinnya kerjasama dengan baik antara Instansi terkait Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan stakeholder. Angka capaian ini merupakan akumulasi dari jumlah instansi lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK yaitu mencapai 100%. Capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan

Desember 2021 telah terjalin kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan 13 (tigabelas) organisasi perangkat daerah yaitu :

1. Dinas Kesehatan DIY (digunakan untuk verifikasi data penerima bantuan Jaminan kesehatan);
2. Dinas Sosial DIY (digunakan untuk verifikasi data penerima bansos), Biro Kesra (Biro Bina Mental Spiritual) DIY;
3. Biro Mental Sepiritual DIY
4. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY (digunakan untuk integrasi data pemohon);
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY (terintegrasi dengan aplikasi perijinan HAKI online di dinas perindustrian DIY);
6. Rumah Sakit Panti Rapih (Terintegrasi dengan layanan pendaftaran & database pasien);
7. RSIA Sadewa (Terintegrasi dengan layanan pendaftaran & database pasien);
8. RS Bhayangkara (Terintegrasi dengan layanan pendaftaran & database pasien);
9. Dikpora DIY (digunakan dalam PPDB online dan pemetaan sistem zonasi)
10. Diskominfo DIY (terintegrasi dengan aplikasi jogjapass)
11. Diskop UMKM DIY (digunakan dalam sistem aplikasi sibakul.jogjaprov.go.id)
12. Diskop UMKM DIY (digunakan dalam sistem aplikasi sibakul.jogjaprov.go.id)
13. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (terintegrasi dengan aplikasi pelaporan online tenaga kerja di DIY)
14. BKD DIY (melengkapi data kepegawaian di simpeg)

Capaian pelaksanaan program/kegiatan pada indikator kinerja ini sangat dipengaruhi oleh dinamika penduduk (pindah datang) dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya memiliki KTP-el (tertib administrasi kependudukan). Berikut faktor penghambat dan pendukung pencapaian indikator Persentase penduduk yang ber-KTP (NIK).

Faktor Penghambat:

- Adanya pandemi covid-19 membuat pengurangan target kinerja, aktivitas, dan pendanaan .

Faktor Pendukung :

- Komitmen yang tinggi serta kerjasama yang baik dengan Pemerintah Kabupaten se DIY.

C. Sasaran Ketiga: Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah

C.1. Indikator Kinerja: Kategori RB Perangkat Daerah

Tabel 2. 6 Dinamika Kategori RB Perangkat Daerah

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan	Target	Anggaran	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan	Target	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		**Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**87,50%**	**7,805,500,000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**87,50%**	**7,805,500,000**	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terwujudnya Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	60,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terwujudnya Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	60,000,000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	40,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	40,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	7,000,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	7,000,000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	13,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	13,000,000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terwujudnya pengelolaan keuangan yang valid dan akuntabel	100%	5,548,000,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terwujudnya pengelolaan keuangan yang valid dan akuntabel	100%	5,548,000,000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	5,500,000,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	5,500,000,000	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Tahun	35,000,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Tahun	35,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	1 Dokumen	5,000,000	

							Tahun SKPD			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	8,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	8,000,000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terpeliharanya barang milik daerah	1 Tahun	12,000,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terpeliharanya barang milik daerah	1 Tahun	12,000,000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	12,000,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	12,000,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1,080,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1,080,000,000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9,000,000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	60,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	60,000,000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	9,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	9,000,000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	32,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	32,000,000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	30,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	30,000,000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	890,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	890,000,000	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Laporan	30,000,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Laporan	30,000,000	

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	20,000,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	20,000,000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	590,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	590,000,000	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	0	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	300,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	300,000,000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	190,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	190,000,000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Jenis	100,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Jenis	100,000,000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terwujudnya Pemenuhan PelayananAdministrasi Perkantoran	100%	3,500,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terwujudnya Pemenuhan PelayananAdministrasi Perkantoran	100%	3,500,000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3,500,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3,500,000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	512,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	512,000,000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	22,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	22,000,000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Paket	100,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Paket	100,000,000	

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	140,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	140,000,000	
Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Paket	10,000,000	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Paket	10,000,000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Bulan	50,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Bulan	50,000,000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Paket	190,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Paket	190,000,000	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 136 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Setda DIY, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY mepunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung di bidang perumusan kebijakan strategis tata pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

2.2.1 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2021 terbagi dalam tiga bagian penting.

a) Penguatan fungsi pelayanan di instansi pelaksana Adminduk yang berdampak langsung terhadap kemudahan penduduk dalam mengurus dokumen kependudukan.

Strategi penguatan fungsi pelayanan dilakukan dengan mengoptimalkan kualitas dan kecepatan pelayanan di instansi pelaksana Adminduk. Pemerintah Kabupaten/Kota sudah memberikan pelayanan terbaik kepada warganya dengan secara aktif mendatangi warga untuk melakukan perekaman biometrik di tempat tinggalnya terutama bagi penduduk yang berada di pelosok, penduduk lanjut usia, penduduk yang sedang sakit, dan penduduk rentan lainnya. Selain memberikan pelayanan kepemilikan KTP-el, pemerintah juga memberikan

fasilitasi kepemilikan dokumen penting kependudukan bagi penduduk miskin/marginal yaitu berupa akta kelahiran dan akta perkawinan.

Pemerintah Daerah DIY telah melaksanakan pelayanan terpadu dalam rangka percepatan kepemilikan KTP-el sebanyak dua kali. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Gedung Graha Pandawa Balaikota Yogyakarta dan Pendopo Manggala Parasamsya Kabupaten Bantul. Pelayanan terpadu ini merupakan wujud dari Gerakan Sadar Administrasi Kependudukan *(#GISA*), yang pelaksanaannya melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sasaran utama dari *#GISA* adalah kepemilikan KTP-el pertama kali dan pemegang Surat Keterangan (surat pengganti KTP sementara) dan kepemilikan kartu KIA bagi anak berusia 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari.

Selain itu, dengan adanya pandemi COVID-19, Pemerintah Daerah DIY tetap mampu menjalankan fungsinya untuk memberikan pemahaman dan informasi terkait kebijakan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat serta menampung dan memberikan solusi atas permasalahan yang dialami masyarakat. Fungsi tersebut dikemas secara daring melalui program Dukcapil Menyapa Masyarakat (DMM) yang diselenggarakan atas kerjasama Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dan Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota.

b) Pendayagunaan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan KTP-el untuk mendukung kebutuhan data bagi instansi lintas sektor.

Pada tahun 2021, Pemerintah Daerah DIY telah memberikan dukungan pemanfaatan data kependudukan kepada berbagai instansi yang ada di DIY. Berikut detail pemanfaatan tersebut.

No.	Nama Instansi	Keterangan Pemanfaatan Data
1	Dinas Kesehatan DIY	Verifikasi dan validasi data dalam penanganan covid-19 (melalui Dinas Kominfo DIY)
2	Dinas Sosial DIY	membantu dalam proses verifikasi dan validasi data penerima bantuan
3	Biro Kesra (Biro Bina Mental dan Spiritual) DIY	Verifikasi dan validasi penerima bantuan terkait kegiatan sosial keagamaan.
4	Kantor Pelayanan Terpadu	Verifikasi dan validasi dalam

	Satu Pintu DIY,	pengurusan izin investasi oleh BPKM Yogyakarta
5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY,	Verifikasi dan validasi dalam pengurusan izin Hak Kekayaan Intelektual secara online.
6	Rumah Sakit Panti Rapih,	digunakan dalam integrasi sistem pendaftaran pasien baru.
7	RSIA Sadewa	digunakan dalam integrasi sistem pendaftaran pasien baru.
8	Rumah Sakit Bhayangkara	Terintegrasinya dengan layanan pendaftaran dan database pasien
9	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga DIY	digunakan dalam PPDB *on-line* dan pemetaan sistem zonasi
10	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	telah mengintegrasikan data kependudukan dalam pengembangan aplikasi JogjaPass, yaitu sebuah sistem informasi yang digunakan untuk *self screening* Covid-19 sekaligus identitas digital bagi masyarakat DIY.
11	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY	digunakan dalam sistem aplikasi sibakul.jogjaprov.go.id
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Terintegrasinya dengan aplikasi pelaporan online tenaga kerja di DIY
13	BKD DIY	Melengkapi data kepegawaian di simpeg

Sumber : (Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2021)

Capaian ini juga menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah DIY telah berhasil memenuhi target jumlah instansi lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK sebanyak 100 persen.

c) Pencapaian target daerah terkait kepemilikan dokumen penting administrasi kependudukan (KTP-el, akta kelahiran, dan akta kematian)

Pada tahun 2021, Pemerintah Daerah DIY menargetkan 86,1% penduduk di DIY telah memiliki dokumen penting administrasi kependudukan. Dari target

tersebut sampai dengan akhir Desember 2021 telah terealisasi kepemilikan dokumen penting administrasi kependudukan sebesar 99,42% (115,47% dari realisasi). Dengan kepemilikan dokumen penting administrasi kependudukan, maka masyarakat akan lebih mudah dan terjamin dalam mengakses fasilitas publik.

Tabel 2. 7 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase kepemilikan dokumen penting adminduk (KTP, akta kelahiran, dan akta kematian)	%	114.69	87,21	98,99	113,56	92	107,59
2	Jumlah instansi lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK	instansi	10	13	13	100	15	86.67

Sumber: Biro Tapem Setda DIY, 2021; sengguh.jogjaprov.go.id/e-sakip

Tabel 2. 8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2021 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(11)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.	Persentase kepemilikan dokumen penting adminduk (KTP, akta kelahiran, dan akta kematian)	n/a		87,17 %	87,97 %	89%	90%	98,99 %	100%	92.2%	92.85 %	-

2.	Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah yang direspon dengan kebijakan	n/a	n/a	100%	100%	100%	100%	121.5 %	100%	100%	100%	-

2.2.2 Urusan Otonomi Daerah Dan Pemerintahan Umum

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di DIY didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Dalam rangka Optimalisasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah di DIY, pada Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah. Kegiatan dilaksanakan melalui fasilitasi penerapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) 6 (enam) bidang urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar yaitu Bidang Tenaga Kerja, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bidang Pangan, Bidang Pertanahan, Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan maksud agar terjadi harmonisasi pelaksanaan urusan Pemerintahan dan percepatan pembentukan produk hukum daerah.

Dalam rangka menindaklanjuti PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM, Pemda DIY pada tahun 2020 menerbitkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan SPM di DIY. Regulasi tersebut digunakan pada penerapan Standar Pelayanan Minimal 6 (enam) bidang urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yaitu Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat serta Bidang Sosial.

Koordinasi, monitoring dan evaluasi juga dilakukan dengan pihak-pihak terkait dalam rangka fasilitasi penyelesaian permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah khususnya terkait tindak lanjut pengalihan Sarana dan Prasarana serta Dokumen yang berkaitan dengan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Permasalahan penyelenggaraan pemerintahan yang telah difasilitasi penyelesaiannya yaitu:

1. Pengalihan Aset Jalan Yang Mengalami Perubahan Status
2. Pengalihan Aset Logandeng
3. Pengalihan Aset Situs Sultan Agung Ompak Kerto
4. Pengalihan Aset Eks Metrologi Legal

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah DIY telah menerbitkan 7 (tujuh) Berita Acara Serah Terima (BAST) Pengalihan Aset dan 4 (empat) rekomendasi penyelesaian permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk dapat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait di Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Pusat.

Lebih lanjut, dalam rangka mendukung proses peresmian pemberhentian dan pengangkatan pengganti antarwaktu (PAW) Anggota DPRD DIY dan Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah DIY pada tahun 2021 telah melaksanakan fasilitasi usulan peresmian PAW Anggota DPRD sebanyak 3 usulan. Dari 3 usulan tersebut, 1 diantaranya merupakan usulan PAW Anggota DPRD DIY, 2 usulan PAW Anggota DPRD Kabupaten Bantul. Selain itu, sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, Gubernur DIY juga telah melakukan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sleman, Bantul, serta Gunungkidul Masa Jabatan Tahun 2021-2026.

Dalam aspek Kerjasama, Pemerintah Daerah DIY telah melakukan berbagai kerjasama baik antardaerah, dengan pihak ketiga ataupun kerjasama daerah sebagai bentuk sinergi dengan pemerintah pusat. Pada tahun 2021 Pemda DIY telah melakukan kerjasama antardaerah dalam bentuk 5 (lima) Perjanjian Kerjasama. Pemerintah Daerah DIY juga telah melaksanakan kerjasama dengan Pihak Ketiga melalui 16 (enam belas)) Kesepakatan Bersama/Nota Kesepakatan dan 9 (sembilan) Perjanjian Kerja Sama dan 2 (dua) nota kesepakatan. Selain itu Pemda juga telah melakukan kerjasama sebagai bentuk sinergi dengan Pemerintah Pusat dengan total terdapat 14 hasil yang terdiri dari nota kesepakatan, perjanjian kerjasama dan Rencana kerja (tindak lanjut).

Tabel 2. 9 Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Otonomi Daerah Tahun 2021

Indikator	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2019 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerjasama yang direspon dengan kebijakan	%	100	100	100	100	100	100

Sumber: e-sakip http://monevapbd.jogjaprov.go.id, 2021

Pada Sub Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, dan Kerjasama memiliki indikator kinerja persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerjasama yang direspon dengan kebijakan. Dengan formulasi perhitungan jumlah dinamika penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, dan kerjasama yang direspon dengan kebijakan (Perda, Pergub, SE) tahun berjalan dibagi jumlah dinamika penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, dan kerjasama yang sudah teridentifikasi (23 rumusan bahan kebijakan) dikali 100%. Melalui formulasi tersebut, capaian kinerja sebesar 100%, dimana terdapat 18 bahan rumusan kebijakan untuk merespon dinamika penyelenggaraan otonomi daerah dan kejelasan urusan pemerintahan antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pemerintah kabupaten/kota. Indikator kinerja Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah yang direspon dengan kebijakan bersifat kumulatif, artinya ketercapaian indikator ini berdasarkan jumlah kumulatif kebijakan yang dihasilkan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tugas dan Fungsi

Tugas

Biro Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, kependudukan, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Fungsi

Biro Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja;
b. penyiapan bahan kebijakan bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, kependudukan, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
c. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, kependudukan, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
d. pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, kependudukan, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
e. fasilitasi dan koordinasi proses pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah;
f. fasilitasi dan koordinasi proses administrasi pergantian antar waktu pimpinan dan anggota DPRD;
g. fasilitasi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Daerah;
h. perumusan kebijakan strategis urusan keistimewaan bidang tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
i. fasilitasi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
j. fasilitasi penyelenggaraan dan pembinaan Pemerintah Daerah, Desa dan Kelurahan;
k. penyiapan bahan koordinasi instansi vertikal;
l. fasilitasi dan pengoordinasian hubungan antar Pemerintah Daerah;
m. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
n. penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan evaluasi otonomi Daerah;
o. pelaksanaan pembinaan administrasi kependudukan;

Berikut adalah beberapa isu strategis yang dilakukan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY:

1. Peningkatan pengelolaan pemerintahan secara efektif dan efisien.
   a. Harmonisasi hubungan antar pemerintah daerah sangat berkaitan erat dengan pengelolaan dan penyelesaian permasalahan di wilayah perbatasan antar pemerintah daerah. Disamping itu peningkatan kerjasama antar daerah juga dapat seiring sejalan dengan terselesaikannya permasalahan di wilayah perbatasan tersebut.
   b. Upaya-upaya penegasan batas wilayah diantaranya melalui pemeliharaan pilar dan papan batas serta pemahaman/sosialisasi tentang Permendagri yang mengatur tentang batas wilayah sehingga aparat maupun masyarakat paham mengenai batas wilayah perbatasan secara administratif, bukan yang ditandai dengan kenampakan alam saja.
2. Peningkatan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan pemerintah pusat maupun pemerintah-pemerintah kabupaten/kota.
   a. Koordinasi, konsultasi mengenai ruang lingkup penyelenggaraan urusan (melalui NSPK) dengan pemerintah pusat untuk disosialsasikan ke pemerintah daerah agar adanya kejelasan mengenai batasan ruang lingkup rincian urusan pemerintahan. Namun untuk urusan sub bidang urusan yang belum ada NSPKnya, pelaksanaan menjadi urusan bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota.
   b. Tidak diaturnya ketentuan yang mengatur anggota DPRD kab/kota maupun provinsi yang menjadi terdakwa dalam perkara pidana umum maupun khusus dalam hal keuangan, dalam masa tenggang menunggu keluarnya keputusan pemberhentian sementara baik dari Gubernur maupun Menteri Dalam Negeri. Sehingga perlu penyamaan pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundangan yang mengatur pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD yang menjadi terdakwa dalam pidana khusus dan yang mengundurkan diri termasuk hak keuangannya.
   c. Beberapa urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota belum dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya.
   d. Dalam kegiatan pengalihan P3D terutama bidang PU, kewenangan pengalihan aset bersumber dari APBN merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.
3. Pengembangan sistem informasi dan database pemerintahan berbasis IT.Tuntutan pembangunan database pemerintahan berbasis teknologi informasi menjadi hal yang harus segera kita jawab dalam era global ini. Dengan demikian maka adopsi dan

pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan harus semakin ditingkatkan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang cepat dan tepat.

a. Peningkatan pelayanan bidang kependudukan

   Kepemilikan akta (terutama akta kelahiran, akta kematian, dan akta perkawinan) oleh penduduk, terutama pada keluarga miskin masih rendah. Berdasarkan data SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) masih terdapat instansi atau lembaga swasta layanan publik belum melaksanakan tertib administrasi kependudukan, misal: masih dapat berlakunya surat keterangan kelahiran atau kematian dari desa/ kelurahan padahal semestinya menggunakan akta kelahiran atau akta kematian. Sementara itu, masih terdapat pemberlakuan surat keterangan domisili padahal semestinya sudah menggunakan KTP.

b. Melakukan sosialisasi dengan berbagai macam media untuk meningkatkan jumlah penduduk wajib KTP yang belum melakukan perekaman KTP-el untuk melakukan perekaman.

c. Aksesibilitas masyarakat tentang data di bidang kependudukan melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

d. Kesadaran penduduk untuk melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil masih kurang. Padahal hal ini berpengaruh pada akurasi dan kemutakhiran data kependudukan.

4. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah:

   a. Berkaitan dengan pengalihan urusan kewenangan masih terdapat permasalahan belum adanya kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Pusat terkait pengalihan aset Terminal A Kota Yogyakarta dan aset penyuluhan perikanan.

   b. Terkait dengan segmen batas daerah antar kabupaten/kota lingkup DIY, untuk pengambaran peta batas daerah skala besar besar (1 : 5.000) saat ini belum dapat dilaksanakan dengan optimal karena belum ada kesepakatan dengan wilayah yang berbatasan di Provinsi Jawa Tengah (desa dan kabupaten). Dengan demikian peta database tersebut (tahun 2014-2018) belum dapat digunakan untuk mendorong percepatan pelaksanaan KSP.

   c. Kurangnya pemahaman pemerintah Kabupaten / Kota tetang Pergub Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pedoman Verifikasi Kelengkapan Dokumen Pergantian Antar

Waktu (PAW) Persetujuan Pemanggilan Untuk Penyidikan dan Pemberhentian Sementara Anggota DPRD.

d. Kepemilikan KTP-el bagi penduduk berstatus wajib KTP terkendala oleh distribusi blangko dari Ditjen Dukcapil Kemendagri yang masih kurang mencukupi. Pada tahun 2018, total blangko yang diperoleh dari Kemendagri sebanyak 205.000 keping yang diterima oleh Dinas Dukcapil kabupaten/kota. Namun kebutuhan blangko untuk pelayanan kepada penduduk masih jauh dari cukup. Hal ini menyebabkan sebagian penduduk belum dapat menerima fisik KTP-el.

e. Antusiasme orang tua untuk menguruskan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak-anak mereka menyebabkan lonjakan permohonan di Dinas Dukcapil kabupaten/kota, terutama di daerah yang padat penduduk seperti Sleman dan Kota Yogyakarta. Tingginya antusiasme tersebut tidak diimbangi dengan kesiapan sarana prasarana seperti ketersediaan blangko dan ribbon film, alat cetak, serta personel. Akibatnya waktu yang dibutuhkan untuk pencetakan sampai penyerahan kepada pemohon KIA menjadi lebih lama.

f. Adanya perbedaan persepsi dalam memahami beberapa kebijakan baru yang tertuang dalam Perpres Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, terutama menyangkut perlu tidaknya surat pengantar RT/RW atau desa/kelurahan. Padahal dalam Perpres tersebut tidak lagi mengatur adanya surat pengantar untuk pengurusan dokumen kependudukan. Akibatnya, penyikapan atas regulasi dalam Perpres Nomor 96 Tahun 2018 berbeda di setiap kabupaten/kota.

g. Instansi penyelenggara bidang kependudukan di tingkat provinsi maupun instansi pelaksana di tingkat kabupaten/kota sering kali mendapatkan permohonan akses data penduduk dari instansi vertikal. Padahal dalam Permendagri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el, menyatakan bahwa instansi vertikal hanya dapat mengajukan permohonan akses data ke Ditjen Dukcapil Kemendagri. Namun bila instansi di daerah tidak memberikan akses data akan menghambat pelayanan publik di daerah.

h. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

i. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Perangkat Daerah

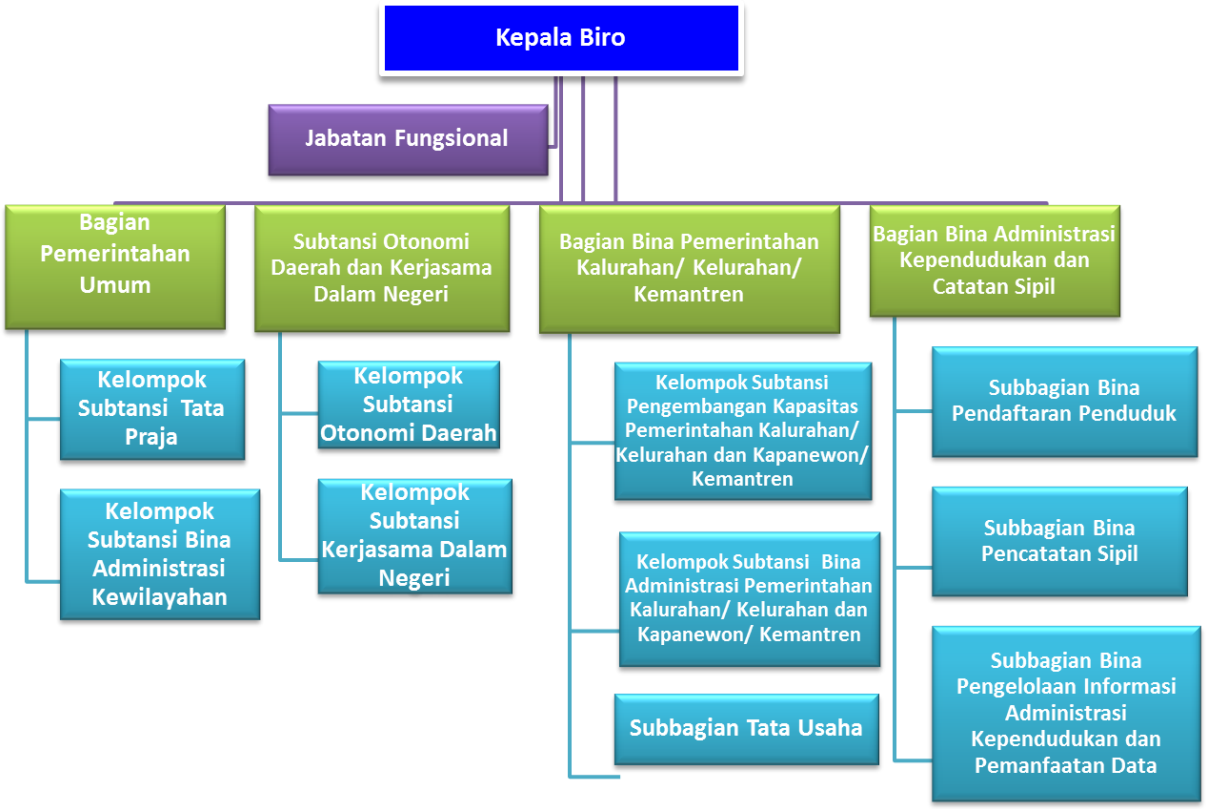

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada Tahun Anggaran 2023 Biro Tata Pemerintahan pada Ranhir RKPD 2023 merencanakan 10 Program (7 Program APBD Murni, 3 Program Dana Keistimewaan), 19 kegiatan (16 Kegiatan APBD Murni, 3 Kegiatan Dana Keistimewaan), dan 35 subkegiatan (32 Sub kegiatan APBD Murni, 3 Sub kegiatan Dana Keistimewaan) untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Biro Tata Pemerintahan pada khususnya dan Pemerintah Daerah DIY pada umumnya.

Tabel 2. 10 Rencana Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama, serta pemerintahan kalurahan/kelurahan dan	Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama yang direspon dengan kebijakan	100%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
kapanewon/kemantren.		
Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	Persentase kepemilikan dokumen penting kependudukan	89%
Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A

Untuk tahun 2023 Biro Tata Pemerintahan merancang program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator rencana kinerja tahunan di atas. Berikut disampaikan secara singkat review program yang terdapat pada dokumen Rancangan Akhir RKPD 2023 dengan hasil analisis kebutuhan yang ada di Biro Tata Pemerintahan Setda DIY.

Tabel 2. 11 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan**	**Target**	**Anggaran**	**Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan**	**Target**	**Anggaran**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		**Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**87,50%**	**7.805.500.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**87,50%**	**565.783.400**	**Jumlah pagu berkurang**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Terwujudnya Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD**	**100 %**	**60.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Terwujudnya Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD**	**100 %**	**21.719.900**	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	40.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	11.247.200	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	4 Dokumen	7.000.000	-		-	-	0	Sub kegiatan dihapu

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan**	**Target**	**Anggaran**	**Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan**	**Target**	**Anggaran**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penyusunan Dokumen DPA-SKPD								s
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	13.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	10.472.700	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Terwujudnya pengelolaan keuangan yang valid dan akuntabel**	**100 %**	**5.548.000.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Terwujudnya pengelolaan keuangan yang valid dan akuntabel**	**100 %**	**43.724.600**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	5.500.000.000	-		-	-	0	Sub kegiatan dihapus
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Tahun	35.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	31.560.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan**	**Target**	**Anggaran**	**Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan**	**Target**	**Anggaran**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					SKPD					
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.644.400	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	8.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	7.520.200	
Administrasi Barang Milik Daerah pada		**Terpeliharanya barang milik daerah**	**1 Tahun**	**12.000.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada**		**Terpeliharanya barang milik daerah**	**1 Tahun**	**11.400.000**	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan**	**Target**	**Anggaran**	**Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan**	**Target**	**Anggaran**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Perangkat Daerah					**Perangkat Daerah**					
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	12.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	11.400.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD**	**100 %**	**1.080.000.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD**	**100 %**	**317.969.900**	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.531.600	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	60.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	32.203.400	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan**	**Target**	**Anggaran**	**Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan**	**Target**	**Anggaran**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	9.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	6.984.900	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	32.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	21.489.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	30.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	11.160.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	890.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	228.601.000	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Laporan	30.000.000						Dihapus

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan**	**Target**	**Anggaran**	**Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan**	**Target**	**Anggaran**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	20.000.000						Dihapus
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**590.000.000**						**Dihapus**
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	0						Dihapus
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	1 Unit	300.000.000						Dihapus

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan**	**Target**	**Anggaran**	**Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan**	**Target**	**Anggaran**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Disediakan								
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	190.000.000						Dihapus
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Jenis	100.000.000						Dihapus
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Terwujudnya Pemenuhan PelayananAdministrasi Perkantoran**	**100 %**	**3.500.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Terwujudnya Pemenuhan PelayananAdministrasi Perkantoran**	**100 %**	**2.000.000**	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan**	**Target**	**Anggaran**	**Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan**	**Target**	**Anggaran**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Barang Milik Daerah yang terpelihara**	**100 %**	**512.000.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Barang Milik Daerah yang terpelihara**	**100 %**	**168.969.000**	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	22.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	17.744.300	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1 Paket	100.000.000						Dihapus

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan**	**Target**	**Anggaran**	**Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan**	**Target**	**Anggaran**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lainnya		Dipelihara/Direhabilitasi								
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	140.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	114.142.400	
Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Paket	10.000.000						Dihapus
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Bulan	50.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Bulan	37.082.300	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan**	**Target**	**Anggaran**	**Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan**	**Target**	**Anggaran**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Paket	190.000.000						Dihapus
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN		**Persentase pelayanan sarana prasarana keistimewaan terhadap pelaksanaan kegiatan keistimewaan urusan pertanahan**	**100 %**	**350.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN**		**Persentase pelayanan sarana prasarana keistimewaan terhadap pelaksanaan kegiatan keistimewaan urusan pertanahan**	**100 %**	**150.000.000**	**Jumlah pagu berkurang**
Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten				**350.000.000**	**Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten**				**150.000.000**	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan**	**Target**	**Anggaran**	**Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan**	**Target**	**Anggaran**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten		Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, Dan Kesejahteraan Masyarakat	2 dokumen	350.000.000	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten		Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, Dan Kesejahteraan Masyarakat	1 Dokumen	150.000.000	
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		**Persentase Capaian Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang Tertib dan Berkualitas**	**100 %**	**1.450.000.000**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**		**Persentase Capaian Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang Tertib dan Berkualitas**	**100 %**	**50.000.000**	**Jumlah pagu berkurang**
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				**1.450.000.000**	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintaha**				**50.000.000**	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan**	**Target**	**Anggaran**	**Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan**	**Target**	**Anggaran**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					n Desa					
Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	1 Dokumen	300.000.000	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	1 Dokumen	15.306.800	
Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	1 Dokumen	250.000.000	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	1 Dokumen	18.088.400	TUK berkurang
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	250.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	16.604.800	
Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa		Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	98 Orang	350.000.000						Dihapus

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan**	**Target**	**Anggaran**	**Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan**	**Target**	**Anggaran**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa		Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	300.000.000						Dihapus
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		**Jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang dikelola dan dilestarikan**	**7 objek**	**350.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**		**Jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang dikelola dan dilestarikan**		**187.000.000**	**Jumlah pagu berkurang**
Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman		**Jumlah objek sejarah, bahasa, sastra dan museum yang dikelola**	**76 objek**	**350.000.000**	**Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman**		**Jumlah objek sejarah, bahasa, sastra dan museum yang dikelola**		**187.000.000**	
Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	1 dokumen	350.000.000	Pengadaan Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan		Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan	1 kalurahan	187.000.000	Sub kegiatan diganti

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan**	**Target**	**Anggaran**	**Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan**	**Target**	**Anggaran**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH		**Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan umum, penataan wilayah, otonomi daerah dan kerjasama.**	**100 %**	**1.319.000.000**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**		**Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan umum, penataan wilayah, otonomi daerah dan kerjasama.**	**100 %**	**365.699.300**	**Jumlah pagu berkurang**
Pelaksanaan Tugas Pemerintahan				**569.000.000**	**Pelaksanaan Tugas Pemerintahan**				**99.999.900**	
Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	3 dokumen	169.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	3 dokumen	58.000.000	
Fasilitasi Penataan Wilayah		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	4 dokumen	400.000.000	Fasilitasi Penataan Wilayah		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	5 dokumen	41.999.900	
Pelaksanaan Otonomi Daerah				**450.000.000**	**Pelaksanaan Otonomi Daerah**				**75.000.000**	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan**	**Target**	**Anggaran**	**Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan**	**Target**	**Anggaran**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan		Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	3 dokumen	150.000.000						Dihapus
Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	2 laporan	300.000.000	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	2 laporan	75.000.000	
Fasilitasi Kerja Sama Daerah				**300.000.000**	**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**				**190.699.400**	
Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah		Jumlah Kerja Sama antar Pemerintah Yang difasilitasi	2 Dokumen	200.000.000	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah		Jumlah Kerja Sama antar Pemerintah yang Difasilitasi	2 Dokumen	190.699.400	
Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta		Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang difasilitasi	2 Dokumen	50.000.000						Dihapus
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		Jumlah Kerjasama Yang dievaluasi	1 Laporan	50.000.000						Dihapus

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan**	**Target**	**Anggaran**	**Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan**	**Target**	**Anggaran**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		**Persentase capaian program urusan keistimewaan urusan dan tata laksana yang berkualitas**	**95%**	**2.192.755.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**		**Persentase capaian program urusan keistimewaan urusan dan tata laksana yang berkualitas**	**95%**	**2.192.755.000**	
Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan				**2.192.755.000**	**Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan**				**2.192.755.000**	
Pembinaan Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan		Jumlah Dokumen Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	3 Dokumen	2.192.755.000	Pembinaan Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan		Jumlah Dokumen Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	3 Dokumen	2.192.755.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan**	**Target**	**Anggaran**	**Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan**	**Target**	**Anggaran**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Persentase kepemilikan dokumen penting kependudukan	**89%**				**Persentase kepemilikan dokumen penting kependudukan**	**89%**		
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		**Persentase Tercapainya fasilitasi Administrasi Pendaftaran Penduduk bagi masyarakat di kabupaten/kota**	**100 %**	**222.860.000**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**		**Persentase Tercapainya fasilitasi Administrasi Pendaftaran Penduduk bagi masyarakat di kabupaten/kota**	**100 %**	**59.208.000**	**Jumlah pagu berkurang**
Pelayanan Pendaftaran Kependudukan				**114.840.000**	**Pelayanan Pendaftaran Kependudukan**				**24.474.000**	
Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota	80 Dokumen	53.990.000	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Ko		Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota	80 Dokumen	24.474.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan**	**Target**	**Anggaran**	**Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan**	**Target**	**Anggaran**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
dalam Satu Provinsi		dalam Satu Provinsi			ta dalam Satu Provinsi		dalam Satu Provinsi			
Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk		Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk yang disusun	1 Dokumen	60.850.000						Dihapus
Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan				**108.020.000**	**Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan**				**34.734.000**	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan**	**Target**	**Anggaran**	**Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan**	**Target**	**Anggaran**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	42.320.000	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	19.234.000	
Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk		Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	300 orang	65.700.000	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk		Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	15.500.000	
PROGRAM PENCATATAN SIPIL		**Persentase Tercapainya fasilitasi Administrasi Pencatatan Sipil bagi masyarakat di kabupaten/kota**	**100 %**	**337.500.000**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**		**Persentase Tercapainya fasilitasi Administrasi Pencatatan Sipil bagi masyarakat di kabupaten/kota**	**100 %**	**90.792.000**	**Jumlah pagu berkurang**
Pelayanan Pencatatan Sipil				**215.000.000**	**Pelayanan Pencatatan Sipil**				**41.622.200**	
Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	1 Laporan	215.000.000	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Ko		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	1 Laporan	41.622.200	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan**	**Target**	**Anggaran**	**Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan**	**Target**	**Anggaran**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ta					
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi				**107.500.000**	**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi**				**49.169.800**	
Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil		Jumlah Laporan Hasil Faslitasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	91.000.000	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil		Jumlah Laporan Hasil Faslitasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	44.753.600	
Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	3 dokumen	16.500.000	Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	3 dokumen	4.416.200	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan**	**Target**	**Anggaran**	**Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan**	**Target**	**Anggaran**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				**15.000.000**						**Dihapus**
Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pencatatan Sipil		Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	15.000.000						Dihapus
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		**Persentase Tercapainya fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di DIY**	**100 %**	**275.000.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**		**Persentase Tercapainya fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di DIY**	**100 %**	**33.373.800**	**Jumlah pagu berkurang**
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi				**230.000.000**	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi**				**33.373.800**	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan**	**Target**	**Anggaran**	**Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan**	**Target**	**Anggaran**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	2 Laporan	200.000.000	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	2 Laporan	32.331.100	
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan		Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	5 Dokumen	30.000.000	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan		Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	5 Dokumen	1.042.700	
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi				**45.000.000**						**Dihapus**

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan**	**Target**	**Anggaran**	**Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan**	**Target**	**Anggaran**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	45.000.000						Dihapus
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		**Persentase tercapainya pengelolaan profil kependudukan di DIY**	**100 %**	**80.000.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**		**Persentase tercapainya pengelolaan profil kependudukan di DIY**	**100 %**	**41.626.000**	**Jumlah pagu berkurang**
Penyediaan Profil Kependudukan				**80.000.000**	**Penyediaan Profil Kependudukan**				**41.626.000**	
Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain		Jumlah Dokumen Penyusunan profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain	1 Dokumen	80.000.000	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain		Jumlah Dokumen Penyusunan profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain	1 Dokumen	41.626.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan**	**Target**	**Anggaran**	**Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan**	**Target**	**Anggaran**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TOTAL				**14.382.615.000**					**3.736.237.500**	

Dari rancangan awal program Biro Tata Pemerintahan Setda DIY yang ada di Rancangan Awal RKPD DIY Tahun 2023 sebesar Rp.14.382.615.000,00. Sedangkan setelah dilakukan analisis kebutuhan berdasarkan kondisi (*existing*) saat ini, anggaran Biro Tata Pemerintahan mengalami penurunan yang cukup signifikan, total pagu yakni sebesar Rp.3.736.237.500,00. Hal tersebut terjadi karena seiring berjalannya waktu, terjadi dinamika dalam pemerintahan dan kelembagaan yang harus segera disikapi dan direspon dalam proses perencanaan dan penganggaran demi penyelenggaraan tata pemerintahan yang optimal responsivitasnya sehingga terdapat beberapa kegiatan dan subkegiatan yang dihapuskan, menyesuaikan dengan ketersediaan dana.

Tabel 2. 12 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2023 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					

Sedangkan mengenai usulan program kegiatan dari para pemangku kepentingan pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY pada tahun 2023 belum ada.

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tahun 2022 merupakan tahun berakhirnya RPJMD DIY 2017-2022 yang sekaligus juga menjadi tahun berakhirnya Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 yang berdampak pada penyesuaian Renja Biro Tata Pemerintahan Setda DIY 2023. Menanggapi hal tersebut, Perangkat Daerah DIY perlu melakukan penyusunan Renja Perangkat Daerah untuk satu tahun selanjutnya pada tahun 2023. Bersamaan dengan itu, telah dikeluarkan pula Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022. Dalam instruksi tersebut, Menteri Dalam Negeri menginstruksikan kepada Gubernur yang masa jabatannya berakhir tahun 2022 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Tahun 2023-2026 serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah Provinsi untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

Renja Biro Tata Pemerintahan disusun bersamaan dengan dan mengacu pada RPD DIY Tahun 2023-2026 yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah. Penyusunan Renja kali ini berbeda dengan periode-periode sebelumnya, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri yang telah disebutkan, Penyusunan Renja Perangkat Daerah tidak berpedoman pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang telah berakhir masa jabatannya di tahun 2022, salah satunya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu, dalam penyusunan Renja Biro Tata Pemerintahan ini akan memperhatikan Sasaran Pemda DIY.

Penyelarasan perencanaan pembangunan daerah dan nasional dilaksanakan dengan menggunakan prinsip *money follows program*. Pendekatan tersebut mengutamakan pembagian sumber daya (anggaran) berdasarkan program dan kegiatan prioritas dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

Program dan kegiatan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY mendukung tercapainya sasaran Pemda DIY yakni ***Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan***. berdasarkan rumusan tersebut, ditetapkanlah tujuan Biro Tata Pemerintahan, yang diharapkan akan tercapai di 2023 nanti yaitu; ***Optimalnya Responsivitas Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah***.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Biro Tata Pemerintahan Setda DIY menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan perangkat daerah selama lima tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Perumusan tujuan dan sasaran dalam dokumen Renja Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2023-2026 ini tidak mendasarkan kepada visi dan misi kepala daerah. Hal ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, yang menyebutkan bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026 disusun tanpa Visi dan Misi Kepala Daerah. Agar tercipta kesinambungan dan keselarasan pembangunan daerah, maka perumusan tujuan dan sasaran Renja Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2023-2026 ini mengacu pada visi dan misi RPJPD DIY Tahun 2005-2025, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Tahun 2005-2025 tahap keempat, dan isu strategis aktual. Biro Tata Pemerintahan Setda DIY menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan perangkat daerah selama empat tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan. Rumusan tujuan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY yaitu ”optimalnya responsivitas dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan indikator tujuannya adalah Persentase Responsivitas Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”.

Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dan rasional. Sesuai dengan kaidah perumusan sasaran yang harus memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bound dan continously improve* (SMART-C), maka sasaran harus mempunyai indikator yang terukur dan penetapan sasaran akan lebih mengarahkan pencapaian tujuan secara lebih fokus sehingga pengerahan dan pendayagunaan sumber daya untuk mencapainya dapat lebih efektif dan efisien. Pemda DIY memilikui sasaran Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan, sasaran tersebut dijabarkan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY menjadi tiga sasaran perangkat daerah. Terdapat tiga sasaran pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dalam perencanaan strategis tahun 2023-2026, yaitu:

1. **Meningkatnya tertib tata kelola penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama serta Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren**

Indikator dari sasaran pertama Biro Tata Pemerintahan Setda DIY yaitu Meningkatnya tertib tata kelola penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama dalam negeri serta Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren yang direspon dengan kebijakan. Target tahunan dari sasaran pertama ini bersifat absolut yaitu 100% setiap tahunnya. Artinya bahwa dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama dalam negeri serta Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren setiap tahun seluruhnya direspon dengan kebijakan. Sehingga formulasi penghitungan dari sasaran pertama ini adalah jumlah kebijakan yang merespon dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama dalam negeri serta Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren pada tahun berjalan dibagi jumlah dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama dalam negeri serta Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren pada tahun berjalan x 100 (tahunan).

2. Meningkatnya tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Indikator dari sasaran kedua Biro Tata Pemerintahan Setda DIY ini adalah Persentase kepemilikan dokumen penting kependudukan. Pada tahun 2022, cakupan kepemilikan dokumen penting kependudukan untuk Provinsi DIY sebesar 87,97%. Arahan peningkatan cakupan kepemilikan dokumen penting kependudukan telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati. Dalam upaya pengembangan statistik hayati, percepatan perluasan cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil memerlukan strategi nasional sebagai strategi dan arahan kebijakan untuk memperkuat koordinasi, kolaborasi, integrasi antarkementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota serta pemangku kepentingan sehingga dapat menghasilkan statistik hayati yang mumpuni untuk dapat digunakan sebagai basis perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Melalui strategi nasional diharapkan pelayanan administrasi kependudukan menjadi lebih mudah dan terintegrasi dimana masyarakat dengan mudah menjangkau layanan dan secara sadar memutakhirkan setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya.

Formulasi penentuan target kinerja sasaran pada tiap tahunnya didapatkan dari rerata cakupan kepemilikan dokumen penting kependudukan yang terdiri dari Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), Kartu Identitas Anak (KIA), Akta Kelahiran, dan

Akta Kematian. Dasar penentuan target kinerja sasaran mempertimbangkan pada target kinerja sasaran baik nasional maupun kabupaten/kota.

3. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah

Indikator dari sasaran ketiga Biro Tata Pemerintahan Setda DIY yaitu Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, dengan target empat tahun ke depan masuk dalam kategori A atau sangat baik secara berturut-turut.

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun-				
				Baseline 2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Optimalnya Responsivitas Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	a. Meningkatnya tertib tata kelola penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama serta Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren	Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama daerah serta pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren yang direspon dengan kebijakan	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Meningkatnya tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen penting kependudukan	87,97%	89%	90%	91%	92%
		c. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi yang dirilis	A	A	A	A	A

Tujuan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY yaitu *Optimalnya Responsivitas Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Sedangkan untuk sasaran strategisnya ada 3 (tiga) diantaranya; 1). Meningkatnya tertib tata kelola penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama serta Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren (target 100%), 2). Meningkatnya tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (target 89%), 3) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah (target A).

3.3 Program dan Kegiatan

Tabel 3. 2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan	Rencana Tahun 2023		Rencana Tahun 2024	
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Persentase Responsivitas Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100		100	
	Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama daerah serta pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren yang direspon dengan kebijakan	100%		100%	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,50%	565.783.400	87,51%	7,805,500,000
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	21.719.900	100%	60,000,000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan	Rencana Tahun 2023		Rencana Tahun 2024	
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	11.247.200	5 Dokumen	40,000,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	10.472.700	2 Laporan	13,000,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terwujudnya pengelolaan keuangan yang valid dan akuntabel**	**100%**	**43.724.600**	**100%**	**5,548,000,000**
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	31.560.000	1 Dokumen	35,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.644.400	1 Dokumen	5,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	7.520.200	4 Laporan	8,000,000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Terpeliharanya barang milik daerah**	**1 Tahun**	**11.400.000**	**1 Tahun**	**12,000,000**

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan	Rencana Tahun 2023		Rencana Tahun 2024	
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	11.400.000	1 Laporan	12,000,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD**	**100%**	**317.969.900**	**100%**	**1,080,000,000**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.531.600	1 Paket	9,000,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	32.203.400	2 Paket	60,000,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	6.984.900	1 Paket	9,000,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	21.489.000	2 Paket	32,000,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	11.160.000	2 Dokumen	30,000,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	228.601.000	1 Laporan	890,000,000
Penyediaan Jasa Penunjang	**Terwujudnya Pemenuhan**	**100%**	**2.000.000**	**100%**	**3,500,000**

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan	Rencana Tahun 2023		Rencana Tahun 2024	
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Urusan Pemerintahan Daerah	**PelayananAdministrasi Perkantoran**				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	3,500,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Barang Milik Daerah yang terpelihara**	**100%**	**168.969.900**	**100%**	**412,000,000**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	17.744.300	1 Unit	22,000,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	114.142.400	12 Unit	140,000,000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Bulan	37.082.300	12 Bulan	50,000,000
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	**Persentase pelayanan sarana prasarana keistimewaan terhadap pelaksanaan kegiatan keistimewaan urusan pertanahan**	**100%**	**150,000,000**	**100%**	**450,000,000**

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan	Rencana Tahun 2023		Rencana Tahun 2024	
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten			**150,000,000**		**450,000,000**
Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, Dan Kesejahteraan Masyarakat	1 dokumen	150,000,000	3 dokumen	450,000,000
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Capaian Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang Tertib dan Berkualitas**	**100%**	**50.000.000**	**100%**	**3,240,000,000**
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			**50.000.000**		**3,240,000,000**
Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	1 Dokumen	15.306.800	1 Dokumen	310,000,000
Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	1 Dokumen	18.088.400	2 Dokumen	2,000,000,000
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	16.604.800	1 Dokumen	260,000,000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan	Rencana Tahun 2023		Rencana Tahun 2024	
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	**Jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang dikelola dan dilestarikan**		**187,000,000**	**n/a**	**0**
Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan			**187,000,000**	**n/a**	**0**
Pengadaan Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan	Jumlah Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan	1 kalurahan	187,000,000	n/a	0
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	**Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan umum, penataan wilayah, otonomi daerah dan kerjasama.**	**100%**	**365.699.300**	**100%**	**1,360,000,000**
Pelaksanaan Tugas Pemerintahan			**99.999.900**		**575,000,000**
Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	3 dokumen	58.000.000	3 dokumen	175,000,000
Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	5 dokumen	41.999.900	4 dokumen	400,000,000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan	Rencana Tahun 2023		Rencana Tahun 2024	
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Pelaksanaan Otonomi Daerah			**75,000,000**		**415,000,000**
Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	2 laporan	75,000,000	2 laporan	315,000,000
Fasilitasi Kerja Sama Daerah			**190.699.400**		**370,000,000**
Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama antar Pemerintah Yang difasilitasi	2 Dokumen	190.699.400	2 Dokumen	250,000,000
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	**Persentase capaian program urusan keistimewaan urusan dan tata laksana yang berkualitas**	**95%**	**2,192,755,000**	**100%**	**2,260,000,000**
Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan			**2,192,755,000**		**2,260,000,000**
Pembinaan Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	3 Dokumen	2,192,755,000	3 Dokumen	2,260,000,000
	Persentase kepemilikan dokumen penting	**89%**		**90%**	

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan	Rencana Tahun 2023		Rencana Tahun 2024	
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	kependudukan				
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	**Persentase tercapainya fasilitasi Administrasi Pendaftaran Penduduk bagi masyarakat di kabupaten/kota**	**100%**	**59.208.000**	**100%**	**238,587,000**
Pelayanan Pendaftaran Kependudukan			**24.474.000**		**126,335,000**
Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	80 Dokumen	24.474.000	80 Dokumen	59,400,000
Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan			**34.734.000**		**112,252,000**
Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	19.234.000	1 Laporan	46,552,000
Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	15.500.000	1 Laporan	65,700,000
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	**Persentase tercapainya fasilitasi Administrasi Pencatatan Sipil bagi masyarakat di**	**100%**	**90.792.000**	**100%**	**341,000,000**

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan	Rencana Tahun 2023		Rencana Tahun 2024	
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	kabupaten/kota				
Pelayanan Pencatatan Sipil			**41.622.200**		**215,000,000**
Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	1 Laporan	41.622.200	1 Laporan	215,000,000
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi			**49.169.800**		**111,000,000**
Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Faslitasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	44.753.600	1 Laporan	93,000,000
Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	3 Dokumen	4.416.200	3 dokumen	18,000,000
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	**Persentase tercapainya fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di DIY**	**100%**	**33.373.800**	**100%**	**275,000,000**
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi			**33.373.800**		**230,000,000**

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan	Rencana Tahun 2023		Rencana Tahun 2024	
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Kependudukan Provinsi					
Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	2 Laporan	32.331.100	2 Laporan	200,000,000
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	5 Dokumen	1.042.700	5 Dokumen	30,000,000
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	**Persentase tercapainya pengelolaan profil kependudukan di DIY**	**100%**	**41.626.000**	**100%**	**80,000,000**
Penyediaan Profil Kependudukan			**41.626.000**		**80,000,000**
Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Penyusunan profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain	1 Dokumen	41.626.000	1 Dokumen	80,000,000

Sumber : Bahan KUA-PPAS 2023 Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Biro Tata Pemerintahan Tahun 2023 merencanakan anggaran sebesar Rp 3.736.237.500,00 untuk melaksanakan 10 Program, 19 kegiatan, dan 35 subkegiatan.

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja merupakan dokumen tahunan yang berpedoman pada dokumen renstra perangkat daerah. Pada Tahun Anggaran 2023 nanti, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY akan melaksanakan 10 Program (7 Program APBD Murni, 3 Program Dana Keistimewaan), 19 kegiatan (16 Kegiatan APBD Murni, 3 Kegiatan Dana Keistimewaan), dan 35 subkegiatan (32 Sub kegiatan APBD Murni, 3 Sub kegiatan Dana Keistimewaan). Keseluruhan rencananya akan dibiayai dengan skema anggaran APBD. Lebih jelasanya berikut Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023 yang akan dilaksanakan oleh Biro Tata Pemerintahan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Biro Tata Pemerintahan pada khususnya dan Pemerintah Daerah DIY pada umumnya.

Tabel 4. 1 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya tertib tata kelola penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama serta Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren	Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama daerah serta pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren yang direspon dengan kebijakan	100%
Meningkatnya tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen penting kependudukan	89%
Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi yang dirilis	A

Disamping skema penganggaran APBD reguler, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY juga menerima kegiatan dengan skema APBD melalui pendanaan Dana Keistimewaan (Danais) untuk urusan Keistimewaan yakni pada urusan pertanahan, kebudayaan, serta kelembagaan dan ketatalaksanaan. Secara mendetail belum bisa disampaikan, karena kegiatan beserta angka nominal anggarannya merupakan pemberian dari pemerintah pusat. Berikut tabel rencana Kerja dan Pendanaan Biro Tapem Setda DIY:

Tabel Rencana Kerja Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun Anggaran 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDTahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
														Nasional	Daerah	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
2	**10**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**150,000,000**					
2	**10**	**11**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN**	-	0		0	0 0	**150,000,000**					
2	**10**	**11**	5.01		**Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten**	Terselenggaranya penatausahaan tanahkasultanan dan tanah kadipaten	%		%	100 %	**150,000,000**					
2	10	11	5.01	01	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, DanKesejahteraan Masyarakat				1 Dokumen	150,000,000		Dana Keistimewaan DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitaslayanan publik	
2	**12**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**224,999,800**					
2	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	Persentase tercapainya fasilitasi Administrasi Pendaftaran Pendudukbagi masyarakat di kabupaten/kota	100 %		0 %	100 %	**59,208,000**					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDTahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
														Nasional	Daerah	
2	**12**	**02**	1.01		**Pelayanan Pendaftaran Kependudukan**	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	%		%	100 %	**24,474,000**					
2	12	02	1.01	02	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi KependudukanLintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi				80 Dokumen	24,474,000		PENDAPATAN ASLIDAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitaslayanan publik	Masyarakat diDIY
2	**12**	**02**	1.02		**Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan**	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	%		%	100 %	**34,734,000**					
2	12	02	1.02	01	Fasilitasi Terkait PendaftaranPenduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	19,234,000		PENDAPATAN ASLIDAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitaslayanan publik	Masyarakat diDIY
2	12	02	1.02	02	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	15,500,000		PENDAPATAN ASLIDAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitaslayanan publik	Masyarakat diDIY

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDTahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
														Nasional	Daerah	
2	**12**	**03**			**PROGRAM PENCATATANSIPIL**	Persentase tercapainya fasilitasi Administrasi Pencatatan Sipil bagi masyarakat di kabupaten/kota	100 %		0 %	100 %	**90,792,000**					
2	**12**	**03**	1.01		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	Terlaksananya kegiatanPelayanan Pencatatan Sipil	%		%	100 %	**41,622,200**					
2	12	03	1.01	04	Fasilitasi Pelayanan BidangPencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipildi Kabupaten/Kota				1 Laporan	41,622,200		PENDAPATAN ASLIDAERAH (PAD)		Peningkatan kualitaslayanan publik	Masyarakat diDIY
2	**12**	**03**	1.02		**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi**	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan SIpil di Provinsi	%		%	100 %	**49,169,800**					
2	12	03	1.02	01	Fasilitasi terkait PencatatanSipil	Jumlah Laporan HasilFasilitasi Pencatatan Sipil				1 Laporan	44,753,600		PENDAPATAN ASLIDAERAH (PAD)		Peningkatan kualitaslayanan publik	Masyarakat diDIY
2	12	03	1.02	04	Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkaitPencatatan Sipil	Jumlah Dokumen HasilKoordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil				3 Dokumen	4,416,200		PENDAPATAN ASLIDAERAH (PAD)			Masyarakat diDIY

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDTahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
														Nasional	Daerah	
2	**12**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	Persentase tercapainya fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di DIY	100 %		0 %	100 %	**33,373,800**					
2	**12**	**04**	1.02		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi**	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	%		%	100 %	**33,373,800**					
2	12	04	1.02	01	Fasilitasi terkait PengelolaanInformasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan HasilFasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan				2 Laporan	32,331,100		PENDAPATAN ASLIDAERAH (PAD)		Peningkatan kualitaslayanan publik	Masyarakat diDIY
2	12	04	1.02	05	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasilpemanfaatan data kependudukan				5 Dokumen	1,042,700		PENDAPATAN ASLIDAERAH (PAD)		Peningkatan kualitaslayanan publik	Masyarakat diDIY
2	**12**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAANPROFIL KEPENDUDUKAN**	Persentase tercapainya pengelolaan profil kependudukan di DIY	100 %		0 %	100 %	**41,626,000**					
2	**12**	**05**	1.01		**Penyediaan Profil Kependudukan**	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Profil Kependudukan	%		%	100 %	**41,626,000**					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDTahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
														Nasional	Daerah	
2	12	05	1.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksikependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain				1 Dokumen	41,626,000		PENDAPATAN ASLIDAERAH (PAD)		Peningkatan kualitaslayanan publik	Masyarakat diDIY
2	**13**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						**50,000,000**					
2	**13**	**04**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**						**50,000,000**					
2	**13**	**04**	1.01		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**						**50,000,000**					
2	13	04	1.01	02	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa				1 Dokumen	15,306,800		PENDAPATAN ASLIDAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam DanTransformasi Pelayanan Publik		
2	13	04	1.01	04	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaandan Pengawasan Pembangunan Desa	jumlah Dokumen hasiFasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa				1 Dokumen	18,088,400		PENDAPATAN ASLIDAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam DanTransformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitaslayanan publik	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDTahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
														Nasional	Daerah	
2	13	04	1.01	05	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan KeuanganDesa				1 Dokumen	16,604,800		PENDAPATAN ASLIDAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitaslayanan publik	
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**187,000,000**					
2	**22**	**08**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**						**187,000,000**					
2	**22**	**08**	5.06		**Sarana Prasarana Keistimewaan UrusanKebudayaan**						**187,000,000**					
2	22	08	5.06	03	Pengadaan Sarana Publikasidan Penanda Keistimewaan	Jumlah Sarana Publikasidan Penanda Keistimewaan				1 kalurahan	187,000,000		Dana Keistimewaan DIY		Peningkatan kualitaslayanan publik	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**											
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**						**3,124,237,700**					
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH PROVINSI**						**565,783,400**					
4	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah**						**21,719,900**					
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah				5 Dokumen	11,247,200		PENDAPATAN ASLIDAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam DanTransformasi Pelayanan Publik		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
														Nasional	Daerah	
4	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah	Jumlah Laporan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	10,472,700		PENDAPATAN ASLIDAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		
4	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**43,724,600**					
4	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaandan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	31,560,000		PENDAPATAN ASLIDAERAH (PAD)			
4	01	01	1.02	05	Koordinasi dan PenyusunanLaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	4,644,400		PENDAPATAN ASLIDAERAH (PAD)			
4	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				4 Laporan	7,520,200		PENDAPATAN ASLIDAERAH (PAD)			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
														Nasional	Daerah	
4	**01**	**01**	1.03		**Administrasi Barang MilikDaerah pada Perangkat Daerah**						**11,400,000**					
4	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang MilikDaerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	11,400,000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLIDAERAH (PAD)			
4	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**317,969,900**					
4	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	17,531,600		PENDAPATAN ASLIDAERAH (PAD)			
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	32,203,400		PENDAPATAN ASLIDAERAH (PAD)			
4	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	6,984,900		PENDAPATAN ASLIDAERAH (PAD)			
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	21,489,000		PENDAPATAN ASLIDAERAH (PAD)			
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen BahanBacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	11,160,000		PENDAPATAN ASLIDAERAH (PAD)			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
														Nasional	Daerah	
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	228,601,000		PENDAPATAN ASLIDAERAH (PAD)			
4	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**2,000,000**					
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa SuratMenyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa SuratMenyurat				1 Laporan	2,000,000		PENDAPATAN ASLIDAERAH (PAD)			
4	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**168,969,000**					
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan DinasJabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	17,744,300		PENDAPATAN ASLIDAERAH (PAD)			
4	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	114,142,400		PENDAPATAN ASLIDAERAH (PAD)			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
														Nasional	Daerah	
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya						37,082,300		PENDAPATAN ASLIDAERAH (PAD)			
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**						**365,699,300**					
4	**01**	**03**	1.01		**Pelaksanaan Tugas Pemerintahan**						**99,999,900**					
4	01	03	1.01	02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum				3 Dokumen	58,000,000		PENDAPATAN ASLIDAERAH (PAD)			
4	01	03	1.01	03	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen HasilFasilitasi Penataan Wilayah				5 Dokumen	41,999,900		PENDAPATAN ASLIDAERAH (PAD)			
4	**01**	**03**	1.02		**Pelaksanaan Otonomi Daerah**	Terlaksananya Pelaksanaan OtonomiDaerah	%		%	100 %	**75,000,000**					
4	01	03	1.02	03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan HasilEvaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan				2 Laporan	75,000,000		PENDAPATAN ASLIDAERAH (PAD)			Pemda DIY, stakeholder terkait, kabupaten/ kota di DIY
4	**01**	**03**	1.03		**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**						**190,699,400**					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
														Nasional	Daerah	
4	01	03	1.03	01	Fasilitasi Kerja Sama AntarPemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yangDifasilitasi				2 Dokumen	190,699,400		PENDAPATAN ASLIDAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam DanTransformasi Pelayanan Publik		
4	**01**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**						**2,192,755,000**					
4	**01**	**10**	5.01		**Penataan Kelembagaandan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan**						**2,192,755,000**					
4	01	10	5.01	10	Pembinaan Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantrendan Kalurahan/Kelurahan yang Dibina				3 Dokumen	2,192,755,000		Dana Keistimewaan DIY			

BAB 5 PENUTUP

Renja 2023 ini merupakan gambaran kinerja Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dalam melaksanakan ketugasan dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Perdais DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Renja 2023 diharapkan dapat memudahkan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dalam menyusun rencana kegiatan dan program tahunan secara terpadu, terarah dan terukur; menyediakan acuan resmi bagi Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan daerah yang dibiayai dari APBD; memudahkan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dalam memahami dan menilai prioritas, sasaran, dan program-program operasional tahunan; serta sebagai tolokukur bagi evaluasi dan penilaian kinerja Biro Tata Pemerintahan Setda DIY.

Program dan kegiatan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dalam Renja Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 136 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah; serta sejumlah peraturan perundangan nasional, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Sehubungan dengan beberapa peraturan-perundangan tersebut di atas, terdapat sejumlah momen penting yang perlu diperhatikan oleh Biro Tata Pemerintahan Setda DIY pada tahun 2021 dan 2022, yang bisa mempengaruhi langkah Biro Tata Pemerintahan kedepannya. Sejumlah momen penting dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan beberapa kebijakan bidang Kependudukan, misalnya kebijakan KIA (Kartu Identitas Anak) dan percepatan pelayanan di bidang administrasi kependudukan.
2. Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY di tahun 2022

Pada tahun anggaran 2023, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY mengusulkan 10 Program (7 Program APBD Murni, 3 Program Dana Keistimewaan), 19 kegiatan (16 Kegiatan APBD Murni, 3 Kegiatan Dana Keistimewaan), dan 35 subkegiatan (32 Sub kegiatan APBD Murni, 3 Sub kegiatan Dana Keistimewaan) yang kegiatannya dibiayai APBD dengan Penganggaran sebesar Rp 3.736.237.500,00. Di antara kesepuluh program tersebut terdapat 3 (tiga) program yang didanai oleh Dana Keistimewaan, yakni Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, dan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.

Pada akhirnya, dalam mencapai target program dan kegiatan di Tahun 2023 nantinya, Biro Tata Pemerintahan membutuhkan dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak, sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan di DIY.

Yogyakarta, 5 Juli 2022

KEPALA BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HARI EDI TRI WAHYU NUGROHO, S.I.P., M.Si.
NIP. 197410171999031002

jogja istimewa

BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY
Komplek Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta